

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian

2.1.1 Tinjauan tentang Penghidupan Berkelanjutan

2.1.1.1 Konsep Penghidupan Berkelanjutan

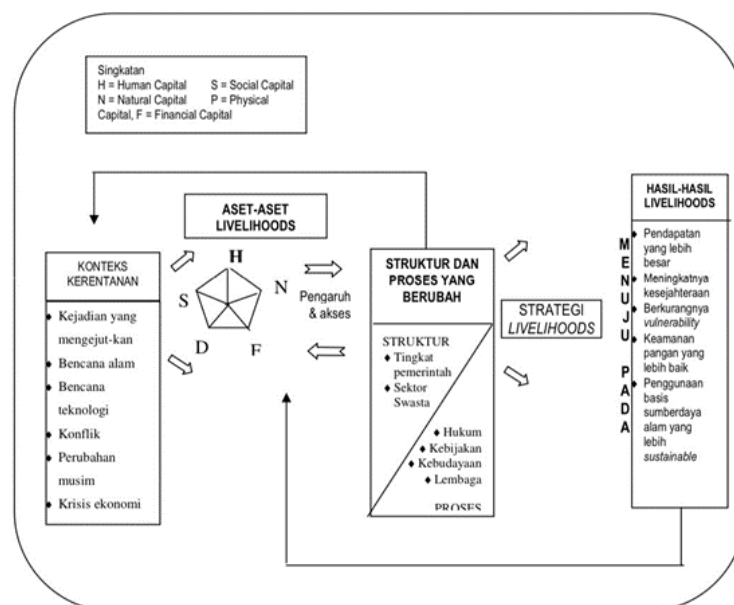
Konsep penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) pertama kali diperkenalkan oleh Brundtland Commission on Environment and Development dan pada tahun 1992, United Nations Conference on Environment and Development memperluas konsep penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Pada tahun 1992 juga Robert Chambers dan Gordon Conway mengusulkan hal tersebut sebagai definisi gabungan dari mata pencaharian pedesaan yang berkelanjutan, dalam hal ini mayoritas yang diterapkan umumnya di tingkat rumah tangga:

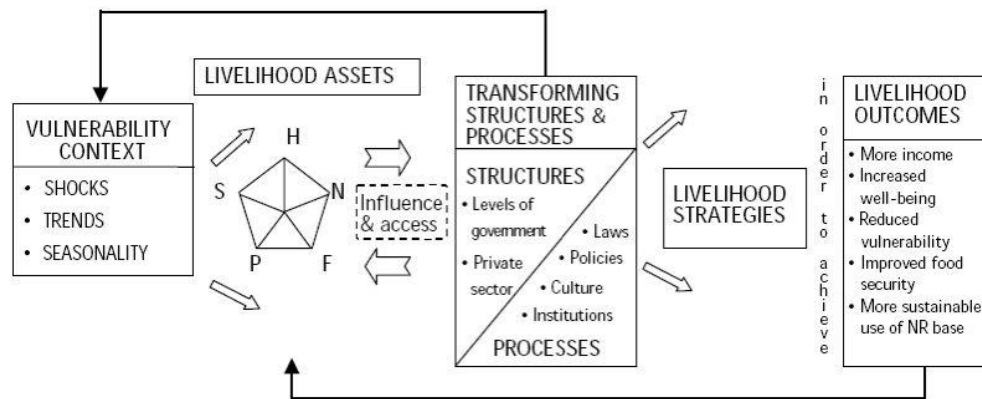
A livelihood comprises the capabilities, assets (stores, resources, claims and access) and activities required for a means of living: a livelihood is sustainable which can cope with and recover from stress and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets, and provide sustainable livelihood opportunities for the next generation; and which contributes net benefits to other livelihoods at the local and global levels and in the short and long term.

Mata pencaharian/penghidupan terdiri dari kemampuan, aset (gudang, sumber daya, klaim, dan akses) dan kegiatan yang diperlukan untuk sarana hidup: mata pencaharian berkelanjutan yang dapat mengatasi dan pulih dari stres dan guncangan, memelihara atau meningkatkan kemampuan dan asetnya, dan memberikan peluang penghidupan yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang memberikan kontribusi manfaat bersih untuk

mata pencaharian lain di tingkat lokal dan global dan dalam jangka pendek dan panjang. (Krantz, 2001, hal. 1)

Selama ini *sustainable livelihood* merupakan sebuah konsep yang menawarkan cara pandang, pendekatan, strategi, dan teknik dalam pembangunan masyarakat desa dan kelompok miskin (Parmawati, 2021, hal. 42). Sebagai sebuah konsep pendekatan, *sustainable livelihood* atau penghidupan berkelanjutan memiliki kerangka kerja sebagai usaha dalam memberikan gambaran kenyataan yang lebih realitas terhadap hubungan antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghidupan dengan kekuatan, kerangka ini dapat berpusat pada individu, keluarga, maupun komunitas.





Gambar 2.1 Kerangka Kerja *Sustainable Livelihood*

Sumber: DFID, 1999, *Sustainable Livelihood Guidance Sheets*

Kerangka kerja *sustainable livelihood* ini mempertimbangkan tiga faktor utama yaitu konteks kerentanan, aset penghidupan serta struktur dan proses yang berubah (DFID, 1999). Dalam konteks kerentanan terdapat faktor guncangan (*shocks*), tren (*trends*), dan musiman (*seasonality*). Konteks kerentanan ini memiliki dampak langsung terhadap aset-aset penghidupan untuk mendapatkan hasil livelihood atau keberlanjutan, Strategi penghidupan (*livelihoods strategies*) menggambarkan upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencapai penghidupan yang memadai. Strategi ini mengacu pada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan dan mengelola aset-aset penghidupan yang ada, menyikapi perubahan yang akan dan yang sedang terjadi serta menentukan prioritas untuk mempertahankan atau meningkatkan penghidupan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi penghidupan berkelanjutan melalui kerangka kerja tersebut

adalah (1) kesejahteraan meningkat, (2) pendapatan masyarakat menjadi lebih baik, (3) pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, (4) kerentanan berkurang dan (5) ketahanan pangan meningkat. Dalam kerangka kerja oleh DFID aset penghidupan tersebut dijabarkan menjadi lima yang digambarkan dengan pentagon aset, yaitu *human capital* (modal manusia), *social capital* (modal sosial), *physical capital* (modal fisik atau infrastruktur), *natural capital* (modal alam), dan *financial capital* (modal keuangan atau ekonomi).

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Penghidupan Berkelanjutan

Pendekatan penghidupan berkelanjutan dalam penerapannya memiliki beberapa prinsip yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan beragam kondisi yang ada. Berikut prinsip-prinsip utama dalam kerangka kerja tersebut (DFID, 1999):

1. People-centered

Pada pendekatan penghidupan berkelanjutan masyarakat menjadi pusat pembangunan. Masyarakat sebagai pusat pembangunan bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat mikro maupun makro

2. Holistik

Pada pendekatan penghidupan berkelanjutan ini berupaya untuk mengenali hambatan hambatan yang paling berpengaruh dan peluang-peluang yang menjanjikan untuk dikelola dalam upaya meningkatkan efektivitas program pembangunan.

3. Dinamis

Pendekatan ini berupaya untuk menelaah dan mengerti dari suatu pola-pola perubahan yang positif untuk menghilangkan pola-pola yang negatif

4. Membangun kekuatan dan kapasitas lokal

Pendekatan ini menunjukkan pengakuan akan kemampuan yang erat pada setiap individu. Apakah kemampuan itu berasal dari akses mereka terhadap sumber daya dan infrastruktur, hubungan sosial yang kuat terhadap lembaga-lembaga yang berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kuncinya dengan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut untuk mencapai tujuannya.

5. Hubungan mikro-makro

Pendekatan ini berupaya untuk menjembatani ketimpangan ini, menegaskan perencanaan dan pengembangan kebijakan tingkat makro berasal dari kajian dan persepsi tingkat mikro. Pembuatan kebijakan berguna untuk meningkatkan efektivitas, walau disadari bahwa ini merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilaksanakan.

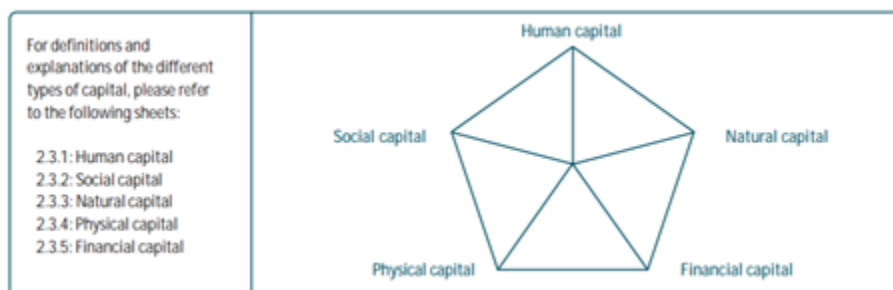
6. Berkelanjutan

Berkelanjutan merupakan kunci dari pendekatan ini. Keberlanjutan memiliki banyak dimensi yakni aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan kelembagaan

2.1.1.3 Pemanfaatan Aset-Aset Penghidupan

Pemanfaatan aset penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) merupakan pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu maupun kelompok memerlukan sejumlah aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil penghidupan (*livelihood*). Kekuatan individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh tingkat keragaman dan keseimbangan antar aset yang dimiliki. Besar kecilnya kekuatan aset tersebut berbeda pada setiap individu maupun kelompok di suatu desa, sehingga aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan penghidupan pun bervariasi. Aset penghidupan tersebut terdiri dari lima jenis, yang divisualisasikan dalam model Pentagon Aset, yaitu: *human capital* (modal manusia), *social capital* (modal sosial), *physical capital* (modal

fisik/infrastruktur), *natural capital* (modal alam), dan *financial capital* (modal keuangan/ekonomi).



Gambar 2.2 Aset *Pentagon Sustainable Livelihood*
 Sumber: DFID, 1999, *Sustainable Livelihood Guidance Sheets*

1. Aset modal manusia (*human capital*)

Aset ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan dalam bekerja dalam strategi penghidupan yang berbeda dan mencapai tujuan penghidupan manusia. Pemanfaatan aset manusia dapat dilakukan bagaimana individu mampu mengikuti dan mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan mengakses layanan kesehatan.

2. Aset modal alam (*natural capital*)

Aset ini berkaitan dengan sumber daya alam yang berada di sekitar masyarakat, aset alam mencakup sumber daya alam kekayaan hayati yang dimiliki dan berguna untuk mata pencaharian seperti lahan atau tanah, air, hutan dan pepohonan. Pemanfaatan aset sumber daya alam dapat dilakukan

dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan seperti pertanian dan mempromosikan konservasi lingkungan.

3. Aset modal finansial (*financial capital*)

Aset ini berkaitan dengan sumber daya finansial ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh masyarakat, aset finansial di masyarakat tani perdesaan dapat berasal dari kas (tunai) pribadi, peminjaman modal, atau dana kolektif dalam rangka menutupi periode selama berkontribusi pada konsumsi dan produksi.

4. Aset modal fisik/infrastruktur (*physical capital*)

Aset fisik terdiri dari infrastruktur dasar dan barang produksi yang diperlukan untuk mendukung mata pencaharian, infrastruktur terdiri dari perubahan lingkungan fisik yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi lebih produktif seperti transportasi, jalan, bangunan, dan kendaraan. Barang produksi adalah alat dan perlengkapan yang digunakan orang untuk berfungsi lebih produktif seperti pasokan air dan sanitasi yang memadai, energi yang bersih dan terjangkau, dan akses informasi (komunikasi).

5. Aset modal sosial (*social capital*)

Aset ini berkaitan dengan jaringan sosial dan hubungan dalam masyarakat, dalam konteks dari kerangka penghidupan berkelanjutan modal sosial diartikan sebagai sumber daya sosial yang dimiliki seperti jaringan dan keterhubungan, baik vertikal (patron/klien) maupun horizontal (antar individu) dalam

meningkatkan kepercayaan dan kemampuan orang untuk bekerja sama dan mengembangkannya, keanggotaan dalam kelompok formal seperti kelompok tani. Pemanfaatan aset sosial dapat dilakukan dengan memperkuat jaringan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan organisasi masyarakat.

2.1.2 Tinjauan tentang Sistem Sumber dan Pemanfaatan Sistem Sumber

2.1.2.1 Sistem Sumber

Sistem sumber dalam pekerjaan sosial merujuk pada rangkaian sumber daya dan jaringan yang tersedia bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sistem sumber dalam pekerjaan sosial dapat mencakup berbagai jenis sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Sistem sumber dapat menggambarkan bagaimana sumber-sumber daya yang terdapat dalam masyarakat saling mempengaruhi dan dipengaruhi kepada individu dan kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Allen Pincus dan Anne Minahan (dalam Sukoco, 2021:51) mengklasifikasikan sumber ke dalam tiga golongan yaitu;

1. Sistem sumber informal atau alamiah (*informal or natural resource systems*)

Sistem informal dalam sistem sumber meliputi sumber daya yang berasal dari hubungan sosial dan kelompok-kelompok masyarakat. Sistem informal ini dapat mencakup keluarga, teman/rekan, dan komunitas, serta norma-norma sosial yang mempengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dan mencari dukungan. Dalam sistem sumber informal, dukungan dan sumber daya sering kali diberikan secara sukarela, tanpa adanya struktur atau aturan yang

formal dan dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang penting bagi individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan sosial mereka.

2. Sistem sumber formal (*formal resource systems*)

Sistem sumber formal meliputi sesuatu yang berada di organisasi atau asosiasi secara keanggotaan yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

3. Sistem sumber kemasyarakatan (*societal resource system*)

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. Contohnya seperti program-program sosial, layanan kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Orang di dalam kehidupannya terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan, seperti sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program-program tenaga kerja, dan sebagainya.

2.1.2.2 Pemanfaatan Sistem Sumber

Pemanfaatan sistem sumber merupakan suatu proses pekerja sosial dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemanfaatan sistem sumber dilakukan melalui proses identifikasi, penilaian, pengorganisasian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam masyarakat salah satunya adalah dengan

pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Berdasarkan klasifikasi sistem sumber oleh Allen Pincus dan Anne Minahan pemanfaatan sistem sumber oleh pekerja sosial dapat dilakukan melalui tiga jenis sistem sumber, yaitu sistem sumber informal atau alamiah, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan, ketiga jenis sistem sumber ini memiliki peran yang berbeda dalam memberikan sumber bagi individu dan kelompok dalam masyarakat.

1. Pengenalan dan penggunaan sistem sumber informal, pekerja sosial perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan sistem sumber informal yang ada dalam masyarakat, seperti dukungan keluarga, jaringan sosial, dan sumber daya lokal lainnya. Pekerja sosial dapat memperkuat sistem sumber informal ini dan menggunakannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Kolaborasi dengan sistem sumber formal dan kemasyarakatan, pekerja sosial juga perlu bekerja sama dengan sistem sumber formal dan kemasyarakatan, seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk memberikan layanan yang lebih lengkap dan terintegrasi bagi individu dan kelompok dalam masyarakat.
3. Meningkatkan akses terhadap sumber daya, pekerja sosial perlu memperkuat akses individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

4. Membangun kapasitas masyarakat, pekerja sosial perlu membantu masyarakat membangun kapasitas mereka dalam memanfaatkan sistem sumber yang ada, baik formal maupun informal serta kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali potensi, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, dan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat.

2.1.3 Tinjauan tentang Kesejahteraan Masyarakat dan Petani Kopi

2.1.3.1 Kesejahteraan Masyarakat

Soekanto (2013:133) menyatakan bahwa “Masyarakat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam artian geografis) dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya”. Masyarakat dapat memiliki arti yang sama dengan komunitas menurut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana masyarakat mampu merasa bahagia, sejahtera, dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kesejahteraan masyarakat diukur dengan berbagai indikator, seperti tingkat kesehatan, pendidikan, penghasilan, akses terhadap pelayanan publik, lingkungan yang sehat, dan keadilan sosial. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti pembangunan kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, pemberian akses

pendidikan dan kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan akses terhadap pelayanan publik. Pengertian kesejahteraan sosial dalam masyarakat sebagai suatu aktivitas dapat diartikan sebagai usaha kesejahteraan sosial, usaha ini merujuk pada pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan di Indonesia. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi sosial (Suharto, 2017, hal. 5). Menurut Suharto (2010:4) tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dari kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

2.1.3.2 Kesejahteraan Petani Kopi

Berdasarkan pengertian kesejahteraan masyarakat, petani kopi merupakan bagian dari masyarakat desa yang melakukan penghidupan dengan mata pencaharian pemanfaatan sumber daya alam berbasis pertanian dan berkebun.

Petani kopi adalah mereka yang berprofesi sebagai petani dan tergabung dalam suatu wilayah pertanian dalam mengelola lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menanam, merawat, memanen, menyimpan, dan menjual hasil pertanian khusus yaitu komoditas kopi.

Kesejahteraan petani kopi merupakan kondisi di mana petani kopi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dan memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi kopi, serta memiliki penghasilan yang memadai dan stabil dari kegiatan pertanian mereka. Kesejahteraan petani kopi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur dasar lainnya yang mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Dalam konteks industri kopi, kesejahteraan petani kopi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi kopi dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

2.1.4 Tinjauan tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat melalui pemberdayaan, advokasi, serta penguatan kapasitas dalam mengatasi masalah sosial (UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial). Kemiskinan, sebagai salah satu masalah sosial struktural, menjadi salah satu fokus utama praktik pekerjaan sosial karena berdampak langsung pada keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, hak, dan peluang untuk berkembang. Sumodiningrat (1999:45)

dalam Jamaludin (2015: 236) masalah kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berurusan dengan persoalan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensionalnya, kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (*material well-being*), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan, bahkan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terkait dengan kesejahteraan materi maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut, (Suharto, 2017:148) menyebutkan terdapat tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerja sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*) Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).
3. Kelompok Rentan (*vulnerable group*) Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering

disebut “*near poor*” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya.

Adapun jenis-jenis kemiskinan yang menjadi pusat perhatian dari beberapa sektor pembangunan salah satunya yaitu kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem menurut Bappenas (2021), merupakan bentuk kemiskinan paling parah karena mencakup deprivasi multidimensi tidak hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan hidup layak. Selain itu, menurut Pinontoan, (2020:26) ada lima jenis kemiskinan yang dapat dibedakan, meliputi:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut terjadi ketika tingkat pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif terjadi saat pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural terjadi ketika faktor budaya menjadi penyebabnya, seperti ketidakmauan untuk berusaha meningkatkan taraf hidup. Kemiskinan kronis mencakup kondisi sosial budaya yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya, keterisolasian, rendahnya pendidikan dan kesehatan, keterbatasan lapangan kerja, dan ketidakberdayaan dalam mengikuti ekonomi pasar.

4. Kemiskinan Sementara

Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang terjadi akibat perubahan siklus ekonomi dari normal menjadi krisis, sering kali bersifat musiman.

Pekerjaan sosial melihat bahwa dalam menangani kemiskinan harus mencakup kelompok dan jenis-jenis kemiskinan secara simultan, penanganan kemiskinan

yang dilakukan pekerjaan sosial berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam kemiskinan sebagai peningkatan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas dan pemenuhan kebutuhannya. Penanganan oleh pekerjaan sosial juga melihat sasaran kemiskinan seseorang atau sekelompok orang tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapi yang dikenal dengan pendekatan *person-in-environment* dan *person-in-situation*.

Pekerja sosial sebagai peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, pekerja sosial dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi kemiskinan, baik secara individu maupun kolektif. Pekerja sosial juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerja sosial dalam *setting* kemiskinan di masyarakat dapat menjadi seorang pemberdaya dalam konteks makro, secara konseptual pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep intervensi dalam kaitannya dengan praktik komunitas. Pemberdayaan masyarakat dan intervensi komunitas merupakan praktik dari pekerjaan sosial komunitas, secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, atau kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Sebagai *community worker*, menurut Schawrtz (dalam Suharto, 2017:69) terdapat 5 tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat:

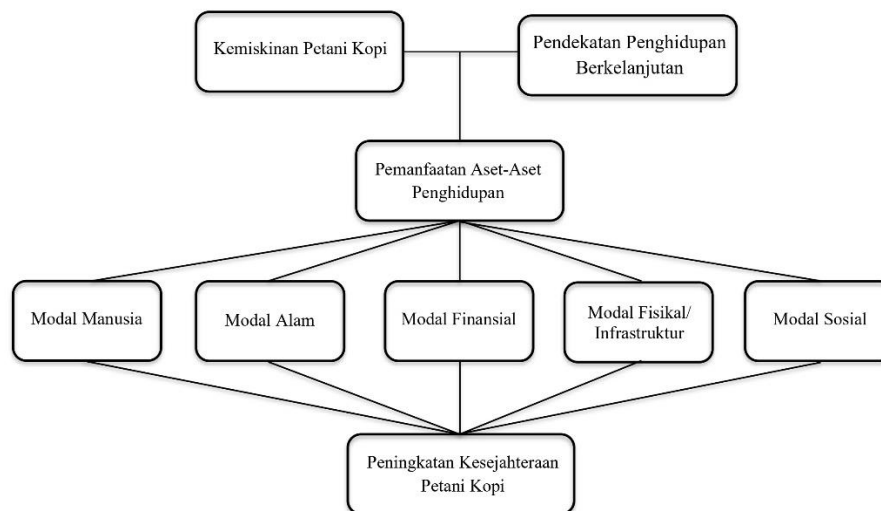
1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk.

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian berfungsi untuk membentuk alur penelitian yang jelas dan logis (Sugiyono, 2017:92). Melalui kerangka pikir, peneliti dapat mengembangkan konteks dan konsep penelitian secara lebih mendalam, sehingga membantu memperjelas hubungan antara konteks penelitian, metodologi, dan teori yang digunakan. Penyusunan kerangka pikir ini memadukan teori yang relevan

dengan masalah yang diangkat, sehingga fokus penelitian dapat dijabarkan secara sistematis dan mudah dipahami.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pikir yang disusun akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis yang telah dijelaskan kemudian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, kerangka ini berperan sebagai panduan dalam mengaitkan teori dengan temuan lapangan serta memastikan penelitian tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.



Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Dokumentasi Pribadi